

DR. ABDUL WAHID, SH, MA.
DR. SUNARDI, SH, MH.
DWI ARI KURNIAWATI, SH. MH.

KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

MAHKAMAH KONSTITUSI

NIRMANA MEDIA UTAMA

KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul kami yang disertai keterangan-keterangan dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar manusia berlaku adil dan kami turunkan besi padanya ada kekuatan yang hebat dan manfaat-manfaat bagi manusia dan agar Allah mengetahui siapa yang menolongNya dan menolong Rasul Nya yang ghaib daripada Nya”(Q.S Al Hadid : 25).

Ayat tersebut diatas jelas tidak menyebut atau memerintahkan manusia atau rasul sekalipun untuk membentuk negara, tetapi memerintahkan untuk menjadi subyek yang berlaku adil atau memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sesama manusia atau siapapun yang berhubungan peran dan amanat.

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang menggunakan bentuk demokrasi, bukanlah “bentuk Islam”, tetapi jika demokrasi dijalankan dengan benar, misalnya mengutamakan terjagana kebinekaan dalam NKRI, atau untuk menegakkan keadilan untuk semua (justice for all), maka konstruksi demokrasi demikian sejalan dengan peran kekhalfahan manusia dalam bernegara yang digariskan dalam Islam.

ISBN 978-602-53587-6-0



KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

Oleh:

Dr. Abdul Wahid, SH, MA.
Dr. Sunardi, SH, MH.
Dwi Ari Kurniawati, SH. MH.

Layout Isi
Anita Fauziah

Design Cover
Em Irul HD

Cetakan Pertama
Agustus 2019

ISBN 978-602-53587-6-0

Dicetak & Diterbitkan Oleh
Nirmana Media Utama
Jl. Kolonel Sugiono 39 Wedoro Waru Surabaya
Nirmanamedia29@gmail.com

KATA PENGANTAR

Para pembelajar ketatanegaraan atau ilmu politik tentu paham, bahwa salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta menyejahterakan warga negaranya.

Mereka tentu juga paham dengan salah satu alasan mengapa negara dibentuk, yakni *The greatest happiness of the greatest number* atau tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah sebanyak-banyaknya. Negara diadakan bukanlah atas kehendak alam, melainkan atas kehendak rakyat melalui suatu bentuk kontrak yang kemudian dijadikan dasar negara. Penciptaan negara melalui kontrak itu dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Semakin banyak rakyat yang mendapatkan kebahagiaan, berarti negara sukses menjalankan amanat istimewanya.

Dalam ranah itu, bukan soal bentuk negara yang menjadi penting, tapi bagaimana negara mengambil peran utama atau bahkan fundamental dalam kehidupan rakyat. Peran negara ini digariskan dalam konstitusi. Apa yang menjadi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak rakyat, sudah diatur di dalamnya.

Dalam ranah filosofis tentang kesejahteraan hidup bernegara, yang dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah norma/aturan/hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya, kedaulatan hukum menjelma menjadi konsep negara hukum atau negara yang didasarkan atas norma, sehingga dari norma yang dibentuk inilah, setiap subyek bernegara atau bermasyarakat diatur.

Dalam konstruksi ketatanegaraan terdapat korelasi yang jelas atau berkepastian antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi demikian ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi

konstitusional. Dalam negara bersistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, demokrasi tanpa pijakan norma hukum atau konstitusi akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi atau pelibatan rakyat akan kehilangan kesejatiannya.

Buku yang berjudul “KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM” ini juga membahas banyak hal atau aspek yang berhubungan dengan kewajiban negara secara konstitusional, yang kewajiban ini sebenarnya menjadi bagian dari “terjemahan” dari doktrin Islam yang mengatur etika kepemimpinan atau moral menjalankan manajemen kekuasaan dalam relasinya dengan rakyat.

Buku ini terdiri dari 14 Bab, yang dalam setiap sub bab dibahas mengenai eksistensi dan konstruksi ketatanegaraan dalam kaitannya dengan problem kehidupan masyarakat dengan segala aspek-aspeknya.

Atas terbitnya buku ini disampaikan terimakasih pada banyak pihak.

Malang, Agustus 2019

**Abdul Wahid
Sunardi
Dwi Ari Kurniawati**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ♦ iii

Daftar Isi ♦ v

BAB I KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

- A. Pengertian, Tujuan, dan Bentuk Negara ♦ 1
- B. Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia ♦ 5
- C. NKRI dalam Konstruksi Ketatanegaraan Islam ♦ 12

BAB II MEMBANGUN TATA INDONESIA BARU, BUKAN FORMALISASI NEGARA ISLAM

- A. Negara dan Fenomena Pelecehan Agama ♦ 23
- B. Ancaman Fundamental Bernegara bernama “*Ilah kontemporer*” ♦ 27
- C. Bangsa ini Harus Banyak Belajar ♦ 29
- D. Bernegara Untuk Kedamaian, Bukan Bernegara Islam ♦ 35

BAB III DOKTRIN KHILAFAH BUKAN UNTUK KONSTRUKSI KETATANEGARAAN INDONESIA

- A. Doktrin Khilafah ♦ 39
- B. Konstruksi Negara Hukum Indonesia ♦ 45
- C. Doktrin Khilafah sebagai Ancaman Ketatanegaraan Indonesia ♦ 50
- D. NKRI dan Pancasila ♦ 55

BAB IV KEBEBASAN BERAGAMA YANG BERKETATANEGARAN ISLAM

- A. Pelanggaran Hak Beragama ♦ 58
- B. Konstitusionalitas Hak Kebebasan beragama ♦ 60
- C. Belajar Berketatanegaran dalam Beragama ♦ 64
- D. Menghentikan Inkonstitusionalitas dalam Beragama ♦ 72

BAB V EKSAMINASI DEMOKRASI PANCASILA DAN KETANGGUHAN KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

- A. Kondisi Paradoks dalam Berideologi ♦ 76

- B. Anatomi Demokrasi Pancasila ♦ 78
- C. Kompilasi Eksaminasi Konstruksi Ketatanegaraan ♦ 83
- D. Menyelamatkan Konstruksi Ketatanegaraan ♦ 88

BAB VI MEMBACA DAMPAK SUKSESI YANG TIDAK DEMOKRATIS TERHADAP KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

- A. Pertanyaan-Pertanyaan Untuk Pesta Suksesi ♦ 96
- B. Mendambakan Suksesi yang Demokratis ♦ 98
- C. Dampak Pesta yang Mengeliminasi Demokrasi Kerugian sangat besar bisa menimpa parpol, masyarakat, dan negara ini, jika pemilihan ♦ 109
- D. Menjaga Martabat Konstruksi Ketatanegaraan dengan Penegakan Etika Islam ♦ 111

BAB VII MULTIKULTURALISME DALAM KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

- A. Multikulturalisme dan Pluralisme sebagai Konstruksi Ketatanegaran ♦ 115
- B. Menerima Realitas Multikulturalisme dan Pluralisme ♦ 119
- C. Penguatan Berketatanegaraan Islam ♦ 124

BAB VIII MENEGAKKAN HAK BERPERIKEMANUSIAAN SEBAGAI APLIKASI BERKETATANEGARAAN ISLAM

- A. Negara Diuji Problem Asasi Kemanusiaan ♦ 136
- B. Tuntutan Peran Militansi Kekhalifahan ♦ 140
- C. Belajar Berketatanegaraan Islam dari Filosofi Semut ♦ 148

BAB IX ISLAM RADIKAL SEBAGAI TANTANGAN SERIUS BERKETATANEGARAAN ISLAM

- A. Islam Radikal, Bukan Soal Jumlah ♦ 155
- B. Diskursus Esensi Radikalisme ♦ 158
- C. Dekonstruksi Akar Gerakan Islam Radikal ♦ 163
- D. Masifikasi Gerakan Deradikalisasi ♦ 165
- E. Mengedukasikan Berketatanegaraan Islam Sejak Usia dini ♦ 168
- F. Menjaga Marwah Ketatanegaraan Islam ♦ 173

BAB X PEREKEMBANGAN MODEL-MODEL RADIKALISME DAN PERUSAKAN KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

- A. Belajar Membaca Sejarah dan Dinamika ♦ 176

- B. *Daullah Islamiyah* dijadikan Kedok Berdampak pada Konstruksi Ketatanegaraan Islam ♦ 182
- C. Model-model Radikalisme ♦ 187

BAB XI KEADILAN SEBAGAI PENENTU KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

- A. Model Pembangkangan Bernegara ♦ 196
- B. Idealitas Memijaki Norma Yuridis ♦ 199
- C. Membumikan Keadilan Sebagai Keharusan Berketatanegaraan Islam ♦ 204
- D. Mengalahkan Pembangkang dengan Merestorasi Mentalitas ♦ 209

BAB XII EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGUATAN KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM

- A. Konstruksi Ketatanegaran Islam dalam Ancaman ♦ 214
- B. Korupsi Legislasi Menjadi Virus Konstruksi Ketatanegaran Islam ♦ 216
- C. Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Konstruksi Ketatanegaraan Islam ♦ 222
- D. Dukungan Bersama terhadap MK dalam Menjaga Konstruksi Ketatanegaraan ♦ 232

BAB XIII KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM DENGAN NASIONALISME PROGRESIF

- A. Kewajiban Memberi yang Terbaik untuk Negara ♦ 238
- B. Negara dalam Ketidaberdayaan di era global ♦ 240
- C. Nasionalisme Progresif dan Konstruksi Ketatanegaran Islam ♦ 244
- D. Pancasila, Globalisasi, dan Ketatanegaraan Islam ♦ 149

BAB XIV DARI KONSTRUKSI KETATANEGARAAN ISLAM MEWUJUDKAN ERA KEEMASAN

- A. Impian Mewujudkan Era Keemasan ♦ 254
- B. Membaca Dinamika Kekerasan Sebagai Ujian Khalifah Negara ♦ 256
- C. Pemimpin Menentukan Konstruksi Ketatanegaraan Islam ♦ 262
- D. Membutuhkan Banyak Pemimpin Progresif ♦ 267

DAFTAR PUSTAKA ♦ 273